BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. *Diffusion of Innovations*

Teori *Diffusion of Innovations* merupakan salah satu kerangka teoretis yang paling berpengaruh dalam studi adopsi inovasi dan perubahan sosial. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Everett M. Rogers pada tahun 1962 melalui karyanya yang berjudul *Diffusion of Innovations*, dan telah mengalami penyempurnaan hingga edisi kelimanya pada tahun 2003. (Rogers, 2003) mendefinisikan difusi sebagai proses di mana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran-saluran tertentu dari waktu ke waktu di antara anggota-anggota suatu sistem sosial. Teori ini tidak hanya menjelaskan bagaimana inovasi menyebar, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempercepat atau memperlambat proses penyebaran tersebut.

Dalam perspektif Rogers, suatu inovasi dapat berupa ide, praktik, atau objek yang dipersepsikan sebagai sesuatu yang baru oleh individu maupun unit adopsi lainnya. Dalam konteks sistem informasi pemerintahan, teori ini memberikan kerangka analitis yang kuat untuk memahami mengapa dan bagaimana sistem seperti SISKEUDES dapat diterima secara berbeda-beda di antara pemerintah desa, serta faktor-faktor apa saja yang menentukan keluasan dan kecepatan penyebarannya.

(Rogers, 2003) mengidentifikasi lima karakter inovasi yang menentukan kecepatan dan keluasan proses difusi, yaitu:

1. *Relative advantage*, sejauh mana inovasi dianggap lebih baik dari sistem atau praktik sebelumnya.
2. *Compatibility*, kesesuaian inovasi dengan nilai-nilai, pengalaman, dan kebutuhan pengguna.
3. *Complexity,* tingkat kerumitan inovasi yang dipersepsikan oleh pengguna dalam memahami dan menggunakannya.
4. *Trialability,* kemungkinan inovasi untuk dicoba secara terbatas sebelum diadopsi sepenuhnya.
5. *Observability* sejauh mana hasil dari penggunaan inovasi dapat dilihat dan dirasakan oleh orang lain.

Kelima karakter ini secara bersama-sama membentuk persepsi pengguna terhadap inovasi yang pada akhirnya menentukan keputusan adopsi. Dalam penelitian ini, teori *Diffusion of Innovations* diposisikan sebagai variabel mediasi yang menjadi perantara hubungan variabel kapasitas organisasi dan kolaborasi terhadap *net benefits* SISKEUDES. Pemilihan teori ini didasarkan pada premis bahwa efek positif dari kapasitas yang kuat dan kolaborasi yang *intens* tidak akan optimal apabila inovasi SISKEUDES itu sendiri belum terdifusi secara efektif di lingkungan pemerintah desa. Sebaliknya, ketika tingkat difusi inovasi tinggi ditandai dengan penerimaan luas, penggunaan yang konsisten, dan persepsi manfaat

yang jelas maka kapasitas organisasi dan kolaborasi akan semakin efektif dalam mendorong pencapaian *net benefits*.

2.2. SISKEUDES Sebagai Konteks Inovasi

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) adalah aplikasi berbasis teknologi informasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2015. Sistem ini dirancang untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa secara lebih sistematis, transparan, dan akuntabel, mencakup seluruh siklus pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban (Malahika et al., 2018). Kehadiran SISKEUDES merupakan respons langsung pemerintah terhadap meningkatnya volume dana desa yang perlu dikelola secara profesional dan dapat diaudit.

Sebagai sebuah inovasi digital di sektor publik, SISKEUDES membawa perubahan mendasar dalam cara pemerintah desa mengelola administrasi keuangannya. Sebelum SISKEUDES, sebagian besar desa mengandalkan pencatatan manual menggunakan buku kas atau *spreadsheet* sederhana yang rentan terhadap kesalahan pencatatan, manipulasi data, dan kesulitan audit. SISKEUDES mengotomasi sebagian besar proses tersebut, mengintegrasikan berbagai dokumen keuangan dalam satu *platform*, dan menghasilkan laporan keuangan yang terstandarisasi sesuai regulasi Permendagri. Hingga tahun 2024, SISKEUDES telah diimplementasikan di lebih dari 75 ribu desa di seluruh Indonesia (Kementerian

Keuangan Republik Indonesia, 2024), menjadikannya salah satu program digitalisasi tata kelola pemerintahan desa terbesar di Asia Tenggara.

Meskipun potensinya sangat besar, implementasi SISKEUDES di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang berdampak pada belum optimalnya *net benefits* yang dihasilkan. Di Kabupaten Wonogiri, Data Inspektorat Daerah (2023) mencatat masih terdapat ketidaksesuaian laporan keuangan dengan realisasi anggaran di sejumlah desa yang dibahas pada bagian latar belakang, mengindikasikan bahwa sistem belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini mendorong perlunya kajian mendalam mengenai faktor-faktor yang menentukan keberhasilan SISKEUDES bukan dari sisi teknis sistem semata, melainkan dari perspektif kapasitas organisasi yang menggunakannya dan kualitas kolaborasi yang melingkupinya, dengan mempertimbangkan sejauh mana inovasi ini telah terdifusi secara efektif di masing-masing desa.

2.3. *Net Benefits*

Konsep *net benefits* merupakan dimensi puncak dalam model kesuksesan sistem informasi yang diperkenalkan secara sistematis oleh DeLone dan McLean (1992) dan diperbarui pada tahun 2003. Dalam model (Delone & McLean, 2003), *net benefits* didefinisikan sebagai dampak bersih positif maupun negatif yang dirasakan oleh pengguna individu maupun organisasi sebagai akibat dari penggunaan sistem informasi.

Model DeLone & McLean menegaskan bahwa *net benefits* merupakan penggabungan dari dampak individual dan dampak organisasi yang dihasilkan dari

penggunaan sistem secara berkelanjutan. Pada level individu, *net benefits* tercermin dari peningkatan produktivitas kerja, kemudahan dalam penyelesaian tugas, akurasi pengolahan data, dan berkurangnya beban administratif. Pada level organisasi, *net benefits* terwujud dalam peningkatan efisiensi proses bisnis, kualitas pengambilan keputusan, transparansi operasional, akuntabilitas pelaporan, serta penghematan sumber daya yang terukur.

Dalam konteks SISKEUDES, *net benefits* dioperasionalisasikan sebagai manfaat nyata yang dirasakan oleh pemerintah desa dari implementasi sistem. Mengacu pada penelitian (Ariyanto et al., 2022) dan (Desak Putu Wahyu Widyaswari et al., 2024) yang secara spesifik mengkaji *net benefits* SISKEUDES di konteks Indonesia, indikator pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dua dimensi utama, yaitu manfaat individual dan manfaat organisasi.

Manfaat individual meliputi peningkatan kemampuan aparatur desa dalam menyelesaikan tugas-tugas administrasi keuangan dengan lebih efisien, peningkatan akurasi dan kelengkapan dalam pengolahan data keuangan, serta berkurangnya waktu yang dibutuhkan untuk proses penatausahaan dan pelaporan. Sementara itu, manfaat organisasi mencakup peningkatan efisiensi proses pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan, peningkatan transparansi penggunaan Dana Desa yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, kemudahan dalam proses audit oleh Inspektorat dan BPKP, serta kontribusi sistem terhadap pencapaian standar tata kelola keuangan desa sesuai regulasi yang berlaku.

2.4. Kapasitas Organisasi

2.4.1. Definisi Kapasitas Organisasi

Dalam perspektif yang lebih luas, (Supriharyanti & Sukoco, 2023) mendefinisikan kapasitas organisasi sebagai kemampuan perubahan organisasi yang mencakup lima belas komponen distingtif, meliputi keterlibatan karyawan, perencanaan strategis, tim yang kohesif dengan tujuan bersama, analisis strategis, budaya belajar, inersia birokrasi, manajemen sikap terhadap perubahan, nilai-nilai organisasi, mandat proyek, manajemen informasi, perubahan yang berkelanjutan, manajemen pemangku kepentingan, eksperimen inovatif, kesadaran lingkungan eksternal, dan manajemen pengetahuan. Kerangka ini menjadi alat yang sangat relevan dalam konteks sektor publik karena secara eksplisit memasukkan dimensi birokrasi dan kompleksitas pemangku kepentingan yang menjadi tantangan khusus di lingkungan pemerintahan.

Dalam kajian sistem informasi di sektor publik, (Frinaldi et al., 2024) menegaskan bahwa teknologi informasi merupakan pendorong penting inovasi di sektor publik, namun untuk memanfaatkan teknologi secara optimal dibutuhkan kapasitas organisasi dan kelembagaan yang memadai. Pernyataan ini mengonfirmasi bahwa kapasitas organisasi adalah landasan yang menentukan sejauh mana investasi teknologi dapat diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi organisasi publik.

2.4.2. Dimensi Kapasitas Organisasi

Kapasitas organisasi dalam konteks implementasi sistem informasi di sektor publik dapat diuraikan ke dalam empat dimensi utama yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain:

1. Kapasitas Sumber Daya Manusia

   Merujuk pada kompetensi, pengetahuan, keterampilan teknis, dan literasi digital aparatur dalam mengoperasikan, memanfaatkan, dan mengembangkan sistem informasi secara optimal. (Desak Putu Wahyu Widyaswari et al., 2024) menemukan bahwa kompetensi SDM aparatur desa terbukti menjadi faktor determinan utama dalam pencapaian *net benefits* SISKEUDES, mengonfirmasi bahwa tanpa kapasitas SDM yang memadai, kualitas teknis sistem yang baik sekalipun tidak akan cukup untuk menghasilkan manfaat yang optimal. (Usman & Sundari, 2024) memperkuat temuan ini dengan menyatakan bahwa pelatihan yang tidak memadai dan rendahnya akuntabilitas aparatur seringkali menghambat pemanfaatan penuh teknologi keuangan seperti SISKEUDES.

2. Kapasitas Kelembagaan

   Mencakup kejelasan struktur organisasi, prosedur kerja yang terdokumentasi, tata kelola internal yang efektif, serta mekanisme pengawasan yang berfungsi optimal. (Aligarh et al., 2023) melalui survei empiris nasional menemukan bahwa faktor organisasi yang

mencakup kapasitas kelembagaan, kesiapan SDM, dan kemampuan adaptif secara signifikan memengaruhi kinerja, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan desa melalui SISKEUDES. (Gascó et al., 2022) mengonfirmasi bahwa kejelasan peran dan tanggung jawab merupakan salah satu faktor terpenting yang menentukan keberhasilan implementasi sistem pemerintahan digital.

3. Kapasitas Infrastruktur

   Berkaitan dengan ketersediaan perangkat keras, konektivitas jaringan, dan lingkungan teknologi yang mendukung operasionalisasi sistem informasi secara optimal. Dalam konteks Indonesia, (Devpolicy Blog, 2024) mencatat bahwa implementasi SISKEUDES menghadapi hambatan serius berupa keterbatasan listrik dan konektivitas internet di banyak desa. Sebagai respons, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan arahan untuk meningkatkan infrastruktur SISKEUDES berbasis online sebagai bagian dari proyek One Data Indonesia. (Iqbal & Juhad, 2026) menegaskan bahwa meskipun tantangan infrastruktur masih ada, integrasi *e-government* telah terbukti memperkuat tata kelola yang partisipatif dan akuntabel di tingkat desa.

4. Kapasitas Kepemimpinan dan Kemampuan Dinamis

   Menekankan peran kritis pemimpin dalam mengelola perubahan, mendorong adopsi inovasi, dan menciptakan iklim organisasi yang kondusif bagi pembelajaran kolektif.

2.5. Kolaborasi

2.5.1. Definisi Kolaborasi

Kolaborasi dalam konteks tata kelola pemerintahan telah berkembang jauh melampaui sekadar koordinasi teknis antar lembaga. (Maulana, 2023) mendefinisikan kolaborasi dalam transformasi digital sektor publik sebagai proses keterlibatan lintas-aktor yang terstruktur, di mana berbagai pemangku kepentingan pemerintahan bekerja bersama secara sinergis untuk mencapai tujuan digitalisasi yang tidak dapat diwujudkan secara individual. Pandangan ini diperkuat oleh (Sitanggang & Prasojo, 2025) yang mendefinisikan kolaborasi antar organisasi sebagai strategi yang diperlukan untuk memfokuskan upaya bersama, menyelaraskan dan memprioritaskan tujuan, serta memanfaatkan hasil-hasil konkret yang mendorong kemajuan layanan publik terpadu.

Dalam perspektif yang lebih komprehensif, (Breaugh et al., 2023) melalui penelitian komparatif di lima negara (Belgia, Denmark, Estonia, Jerman, dan Inggris). Menegaskan bahwa kepemimpinan dan desain kelembagaan merupakan dua pilar utama yang menentukan keberhasilan kolaborasi dalam digitalisasi pemerintahan. Penelitian tersebut menemukan bahwa kolaborasi yang efektif dalam transformasi digital pemerintahan membutuhkan kepemimpinan yang netral dan mampu menyelaraskan regulasi antar lembaga, serta struktur organisasi yang fleksibel dan kapabilitas dinamis yang mampu merespons perubahan secara cepat.

2.5.2. Dimensi Kolaborasi

Kolaborasi dalam konteks implementasi sistem informasi di sektor publik dapat dioperasionalisasikan ke dalam empat dimensi utama sebagai berikut:

1. Berbagi Informasi dan Pengetahuan

   merupakan fondasi dari setiap bentuk kolaborasi yang efektif, dan juga merupakan faktor kunci yang menentukan kualitas hasil kolaborasi antar-lembaga pemerintahan. Tanpa aliran informasi yang terbuka dan konsisten di antara seluruh aktor pemerintah desa, kecamatan, DPMD, dan BPKP. Kolaborasi cenderung terbagi dan tidak menghasilkan dampak bermakna bagi implementasi SISKEUDES.

2. Keselarasan Tujuan dan Penghilangan Silo Organisasi

   Menjadi prasyarat agar kolaborasi menghasilkan dampak yang koheren. (Sitanggang & Prasojo, 2025) mengidentifikasi bahwa kolaborasi dalam jaringan antar-organisasi membutuhkan strategi keterlibatan, motivasi, dan aksi bersama untuk mengatasi paradoks adopsi dalam layanan publik terpadu.

3. Kepercayaan Antar-Aktor

   Merupakan elemen psikologis yang fundamental dalam membangun dan mempertahankan kolaborasi jangka panjang. (Maulana, 2023) menegaskan bahwa kepercayaan antar-aktor merupakan prasyarat

yang tidak dapat disubstitusi dalam keberhasilan transformasi digital sektor publik.

4. Kepemimpinan Netral dan Tata Kelola Kolaborasi

   Menjadi faktor pembeda antara kolaborasi yang berhasil dan yang gagal. Dalam konteks SISKEUDES, kepemimpinan fasilitatif dari DPMD dan kecamatan sangat menentukan kualitas kolaborasi yang terbangun.

2.6. Hubungan Antar Variabel

2.6.1. Hubungan Kapasitas Organisasi terhadap *Diffusion of Innovations* SISKEUDES

Dalam konteks implementasi sistem informasi di sektor publik, kapasitas organisasi yang memadai menjadi salah satu syarat agar inovasi dapat diterima dan menyebar secara efektif di lingkungan pengguna. Organisasi dengan kemampuan sosialisasi yang kuat akan lebih mampu mendorong pemahaman bersama mengenai nilai dan manfaat inovasi yang secara langsung mempercepat proses difusi SISKEUDES di lingkungan pemerintah desa.

(Liao et al., 2023) melalui penelitian terhadap 417 karyawan sistem informasi di 21 pemerintahan negara bagian Amerika Serikat menemukan bahwa kemampuan organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kapasitas penyerapan sistem informasi. Temuan ini menegaskan bahwa kapasitas organisasi bukan sekadar prasyarat administratif, melainkan faktor determinan yang secara aktif membentuk sejauh mana inovasi mampu menyebar dan menghasilkan manfaat

nyata. Berdasarkan argumentasi ini, semakin tinggi kapasitas organisasi pemerintah desa, semakin efektif pula proses *Diffusion of Innovations* SISKEUDES.

2.6.2. Hubungan Kolaborasi terhadap *Diffusion of Innovations* SISKEUDES

Kolaborasi yang efektif antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pendamping desa menciptakan ekosistem yang kondusif bagi penyebaran informasi, penguatan persepsi manfaat inovasi, serta percepatan adopsi SISKEUDES oleh seluruh pengguna.(Maulana, 2023) menegaskan bahwa semakin kuat pola kolaborasi yang dibangun, semakin besar pula tingkat difusi inovasi digital yang dapat dicapai dalam konteks pemerintahan publik. Mekanisme kerjanya dapat dijelaskan sebagai berikut: kolaborasi yang intensif memungkinkan penyebaran informasi tentang manfaat SISKEUDES secara lebih luas (meningkatkan *observability*), mengurangi persepsi kerumitan sistem melalui pendampingan teknis (menurunkan *complexity*), dan membangun kepercayaan kolektif terhadap inovasi (memperkuat *compatibility*) tiga dari lima karakteristik yang menentukan kecepatan difusi dalam teori (Rogers, 2003).

Temuan empiris dari (Aligarh et al., 2023) mengonfirmasi bahwa faktor lingkungan yang mencakup tekanan regulasi dan kolaborasi antar-lembaga secara signifikan berinteraksi dengan faktor organisasi dalam menentukan keberhasilan implementasi SISKEUDES.

2.6.3. Hubungan Kapasitas Organisasi terhadap Kolaborasi

Kapasitas organisasi dan kolaborasi merupakan dua variabel yang saling berkaitan erat dalam ekosistem implementasi sistem informasi di sektor publik.

Organisasi yang memiliki kapasitas tinggi tercermin dari kompetensi SDM, kemampuan koordinasi internal, kepemimpinan adaptif, dan kelembagaan yang solid akan lebih siap secara sumber daya dan kelembagaan untuk terlibat dalam proses kolaborasi lintas-aktor yang produktif (Daft, 2021).

(Maulana, 2023) menemukan bahwa efektivitas kolaborasi lintas-aktor dalam transformasi digital sektor publik sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan masing-masing pihak yang terlibat, di mana kapasitas organisasi menjadi prasyarat agar kolaborasi tidak sekadar bersifat formal tetapi benar-benar operasional dan berdampak. (Aligarh et al., 2023) mengonfirmasi melalui survei empiris nasional bahwa kapasitas kelembagaan dan kesiapan SDM secara signifikan memengaruhi kemampuan pemerintah desa dalam berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan implementasi SISKEUDES.

2.6.4. Hubungan *Diffusion of Innovations* terhadap *Net Benefits* SISKEUDES

Rogers menjelaskan bahwa keberhasilan suatu inovasi dalam menghasilkan manfaat nyata sangat ditentukan oleh sejauh mana inovasi tersebut telah terdifusi secara efektif di dalam sistem sosial organisasi. Dalam penelitian ini, *Diffusion of Innovations* diposisikan sebagai variabel mediasi yang menjembatani hubungan antara kapasitas organisasi dan kolaborasi terhadap *net benefits* SISKEUDES.

(Ariyanto et al., 2022) membuktikan bahwa mekanisme mediasi bekerja secara efektif dalam model *net benefits* SISKEUDES, di mana penggunaan sistem dan kepuasan pengguna sebagai cerminan proses difusi inovasi terbukti memediasi hubungan antara faktor pendorong dengan *net benefits*. Ketika difusi inovasi

berjalan efektif ditandai dengan penerimaan luas, penggunaan yang konsisten, dan persepsi *relative advantage* yang kuat maka *net benefits* SISKEUDES akan tercapai secara lebih optimal dan berkelanjutan.

2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini disajikan untuk memberikan landasan empiris bagi pengembangan model penelitian dan perumusan hipotesis. Berikut adalah uraian dari lima penelitian terdahulu yang dipilih berdasarkan relevansinya dengan variabel-variabel dalam penelitian ini.

Penelitian pertama dilakukan oleh (Liao et al., 2023) dengan fokus kajian pada hubungan antara adopsi sistem informasi, kemampuan organisasi, dan kapasitas penyerapan pengetahuan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja pengetahuan manajer dan karyawan, variabel independen meliputi adopsi sistem informasi dan kemampuan organisasi, serta kapasitas penyerapan yang didukung sistem informasi diposisikan sebagai variabel mediasi. Penelitian ini menggunakan 417 karyawan sistem informasi dari 21 pemerintahan negara bagian di Amerika Serikat sebagai subjek penelitian dengan metode PLS-SEM berbasis *bootstrap*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi sistem informasi saja tidak secara langsung menghasilkan kapasitas penyerapan yang optimal melainkan kemampuan organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kapasitas penyerapan yang didukung sistem informasi. Lebih lanjut, sinergi antara adopsi sistem informasi dan kemampuan organisasi terbukti berdampak positif pada

kapasitas penyerapan, yang pada akhirnya secara signifikan mendorong kinerja pengetahuan baik manajer maupun karyawan.

Penelitian kedua dilakukan oleh (Maulana, 2023) dengan judul kajian tentang tata kelola kolaborasi dan transformasi digital di sektor publik. Penelitian ini tidak menggunakan variabel dalam pengertian kuantitatif konvensional, melainkan berfokus pada pemetaan konseptual mengenai tata kelola kolaborasi, transformasi digital, dan konsep baru "*collaborative digital transformation*" melalui tinjauan literatur sistematis dan pemetaan bibliometrik terhadap literatur akademik internasional dari berbagai basis data. Hasil kajian menunjukkan bahwa kolaborasi lintas-aktor merupakan elemen kunci yang tidak dapat diabaikan dalam keberhasilan transformasi digital sektor publik dan transformasi digital kolaborasi sebagai konsep baru membutuhkan lebih banyak perhatian akademis, khususnya di negara-negara berkembang yang menghadapi tantangan kapasitas kelembagaan yang lebih kompleks.

Penelitian ketiga dilakukan oleh (Ariyanto et al., 2022) dengan judul penelitian tentang pengaruh kualitas sistem informasi dan kepercayaan pada teknologi terhadap *net benefits* SISKEUDES. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi kualitas sistem informasi, kualitas informasi, kualitas layanan, dan kepercayaan pada teknologi. Penggunaan sistem dan kepuasan pengguna diposisikan sebagai variabel mediasi, sedangkan *net benefits* SISKEUDES menjadi variabel dependen. Penelitian ini menggunakan 108 responden pengguna SISKEUDES dari 36 desa di wilayah SARBAGITA

(Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan), Bali, dengan metode PLS-SEM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sistem informasi dan kepercayaan pada teknologi berpengaruh signifikan terhadap penggunaan dan kepuasan pengguna SISKEUDES kepuasan pengguna berpengaruh positif dan signifikan terhadap *net benefits* serta berkontribusi pada terwujudnya masyarakat informasi yang berkelanjutan sesuai target SDGs.

Penelitian keempat dilakukan oleh (Desak Putu Wahyu Widyaswari et al., 2024) dengan judul penelitian tentang pengaruh kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap *net benefits* SISKEUDES. Variabel independen dalam penelitian ini mencakup kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, dan kompetensi sumber daya manusia, dengan penggunaan sistem dan kepuasan pengguna sebagai variabel mediasi, serta *net benefits* SISKEUDES sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan 79 operator kantor desa di Kota Denpasar, Bali, sebagai subjek penelitian dengan metode PLS-SEM menggunakan SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, dan kompetensi SDM secara signifikan meningkatkan penggunaan dan kepuasan pengguna SISKEUDES, penggunaan dan kepuasan pengguna berpengaruh positif terhadap net benefits SISKEUDES, dan kompetensi SDM aparatur desa terbukti menjadi faktor determinan utama dalam pencapaian manfaat sistem secara optimal.

Penelitian kelima dilakukan oleh (Aligarh et al., 2023) dengan judul penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi kinerja, akuntabilitas, dan

transparansi pengelolaan keuangan desa melalui SISKEUDES menggunakan kerangka Technology-Organization-Environment (TOE). Variabel independen mencakup faktor teknologi, faktor organisasi yang meliputi kapasitas kelembagaan, kesiapan SDM, dan tata kelola, serta faktor lingkungan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan desa melalui SISKEUDES. Penelitian ini menggunakan pemerintah desa di Indonesia sebagai subjek penelitian melalui survei empiris nasional dengan metode PLS-SEM *high-order construct*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor organisasi yang mencakup kapasitas kelembagaan, kesiapan SDM, dan kemampuan adaptif terhadap perubahan teknologi secara signifikan memengaruhi kinerja, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan desa dan kapasitas organisasi terbukti sebagai syarat dasar yang menentukan efektivitas implementasi sistem informasi keuangan desa di Indonesia.

Tabel 2. 1. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
1	(Liao et al., 2023)	**Independen:** Adopsi Sistem Informasi, Kemampuan Organisasi **Mediasi:** Kapasitas Penyerapan yang Didukung SI **Dependen:** Kinerja Pengetahuan Manajer & Karyawan	Pemerintahan negara bagian Amerika Serikat	Kemampuan organisasi berpengaruh positif terhadap kapasitas penyerapan SI; sinergi adopsi SI & kemampuan organisasi berdampak positif pada kapasitas penyerapan; kapasitas penyerapan mendorong kinerja pengetahuan.

2	(Maulana, 2023)	**Fokus Kajian:** Tata Kelola Kolaborasi, Transformasi Digital, *Collaborative Digital Transformation*	Bidang kajian akademis tentang tata kelola kolaboratif dan transformasi digital.	Kolaborasi lintas-aktor merupakan elemen kunci transformasi digital sektor publik; konsep "*collaborative digital transformation*" membutuhkan perhatian akademis lebih di negara berkembang.
3	(Ariyanto et al., 2022)	**Independen:** Kualitas Sistem Informasi, Kualitas Informasi, Kualitas Layanan, Kepercayaan pada Teknologi **Mediasi:** Penggunaan Sistem, Kepuasan Pengguna **Dependen:** *Net Benefits* SISKEUDES	Desa di wilayah SARBAGITA (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan), Bali.	Kualitas sistem informasi dan kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan dan kepuasan pengguna; kepuasan pengguna berpengaruh positif terhadap *Net Benefits* SISKEUDES
4	(Desak Putu Wahyu Widyaswari et al., 2024)	**Independen:** Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Kualitas Layanan, Kompetensi Sumber Daya Manusia **Mediasi:** Penggunaan Sistem, Kepuasan Pengguna **Dependen:** Net Benefits SISKEUDES	Kota Denpasar, Bali.	Kualitas sistem, informasi, layanan, dan kompetensi SDM signifikan meningkatkan penggunaan & kepuasan pengguna; kompetensi SDM terbukti menjadi faktor determinan utama pencapaian *Net Benefits* SISKEUDES..
5	(Aligarh et al., 2023)	**Independen:** Faktor Teknologi, Faktor Organisasi (kapasitas kelembagaan, kesiapan SDM, tata	Pemerintah desa di Indonesia survei empiris nasional Technology-Organization-	Faktor organisasi (kapasitas kelembagaan, kesiapan SDM, kemampuan adaptif) signifikan memengaruhi kinerja, akuntabilitas, dan transparansi SISKEUDES; kapasitas

		kelola), Faktor Lingkungan kerangka TOE **Dependen:** Kinerja, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa melalui SISKEUDES	Environment (TOE).	organisasi sebagai prasyarat fundamental efektivitas implementasi Sistem Informasi keuangan desa..

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Pengaruh Kapasitas Organisasi terhadap *Diffusion of Innovations* SISKEUDES

Kapasitas organisasi yang kuat memberikan fondasi yang memungkinkan pemerintah desa untuk tidak hanya mengadopsi inovasi secara formal, tetapi juga menyebarluaskan penerimaan dan penggunaan inovasi secara efektif di seluruh komponen organisasi. (Liao et al., 2023) membuktikan secara empiris bahwa kemampuan organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kapasitas penyerapan sistem informasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa kapasitas organisasi bukan sekadar faktor pendukung, melainkan faktor penentu yang membentuk sejauh mana inovasi mampu terdifusi secara efektif. (Aligarh et al., 2023) lebih lanjut menegaskan bahwa kapasitas organisasi merupakan prasyarat fundamental efektivitas implementasi sistem informasi keuangan desa di Indonesia, termasuk dalam konteks penyebaran dan penerimaan SISKEUDES di tingkat desa. Berdasarkan argumentasi teoretis dan bukti empiris tersebut, maka dirumuskan hipotesis:

H1: Kapasitas organisasi berpengaruh positif terhadap *Diffusion of Innovations* SISKEUDES di Kabupaten Wonogiri.

2.8.2. Pengaruh Kolaborasi terhadap *Diffusion of Innovations* SISKEUDES

Kolaborasi lintas-aktor yang efektif menciptakan kondisi yang mendukung penyebaran informasi tentang manfaat inovasi, membangun kepercayaan kolektif terhadap sistem, dan memberikan pendampingan teknis yang mengurangi hambatan adopsi. (Maulana, 2023) menegaskan bahwa kolaborasi merupakan elemen kunci yang tidak dapat diabaikan dalam keberhasilan transformasi digital sektor publik dan semakin kuat pola kolaborasi yang dibangun, semakin besar pula tingkat difusi inovasi yang dicapai.

Menariknya, dari kelima penelitian terdahulu yang dikaji dalam penelitian ini, tidak satupun yang secara eksplisit menguji pengaruh kolaborasi sebagai variabel independen langsung terhadap *net benefits* SISKEUDES. (Liao et al., 2023) berfokus pada kapasitas organisasi, (Ariyanto et al., 2022) dan (Desak Putu Wahyu Widyaswari et al., 2024) mengkaji kualitas sistem dan kompetensi SDM, sementara (Aligarh et al., 2023) menempatkan kolaborasi sebagai bagian dari faktor lingkungan, bukan sebagai konstruk independen tersendiri. Absennya pengujian empiris hubungan langsung kolaborasi *net benefits* SISKEUDES ini justru memperkuat urgensi dan orisinalitas H2 dalam penelitian ini. Dalam konteks Kabupaten Wonogiri, minimnya koordinasi antara DPMD, kecamatan, dan operator desa menjadi indikasi nyata bahwa kolaborasi yang lemah berkontribusi

pada rendahnya *net benefits* yang diraih. Berdasarkan argumentasi teoritis dan identifikasi gap empiris tersebut, maka hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut:

H2: Kolaborasi berpengaruh positif terhadap *Diffusion of Innovations* SISKEUDES di Kabupaten Wonogiri.

2.8.3. Pengaruh *Diffusion of Innovations* terhadap *Net Benefits* SISKEUDES

Teori *Diffusion of Innovations* (Rogers, 2003) menjelaskan bahwa manfaat nyata suatu inovasi tidak akan terwujud secara optimal apabila inovasi tersebut belum terdifusi secara efektif dalam sistem sosial organisasi. Difusi yang efektif yang ditandai dengan penerimaan luas, penggunaan konsisten, dan persepsi *relative advantage* yang kuat akan dapat tercapainya *net benefits* yang terukur.

Penelitian (Ariyanto et al., 2022) membuktikan bahwa mekanisme mediasi bekerja secara efektif dalam model net benefits SISKEUDES: penggunaan sistem dan kepuasan pengguna sebagai cerminan proses difusi inovasi terbukti memediasi hubungan antara faktor pendorong dengan net benefits. (Desak Putu Wahyu Widyaswari et al., 2024) mengonfirmasi bahwa faktor-faktor yang mempercepat difusi inovasi termasuk kompetensi SDM yang pada akhirnya menghasilkan *net benefits* SISKEUDES yang lebih besar. (Liao et al., 2023) menambahkan bahwa sinergi antara adopsi SI dan kemampuan organisasi menghasilkan dampak yang jauh lebih besar dibandingkan masing-masing faktor yang bekerja sendiri, mengindikasikan bahwa efek pendorong terhadap net benefits bersifat tidak langsung dan bekerja melalui mekanisme difusi inovasi. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3: *Diffusion of Innovations* berpengaruh positif terhadap *net benefits* SISKEUDES di Kabupaten Wonogiri.

2.8.4. Pengaruh Kapasitas Organisasi terhadap Kolaborasi dalam Implementasi SISKEUDES

Kapasitas organisasi dan kolaborasi merupakan dua variabel yang secara teoritis saling terkait erat dalam ekosistem implementasi sistem informasi di sektor publik. Kapasitas organisasi yang kuat mencakup kompetensi SDM, kemampuan koordinasi internal, kepemimpinan adaptif, dan kelembagaan yang solid menjadi fondasi yang memungkinkan suatu organisasi untuk tidak hanya bekerja secara mandiri, tetapi juga membangun dan mempertahankan pola kolaborasi yang efektif dengan pihak-pihak eksternal.

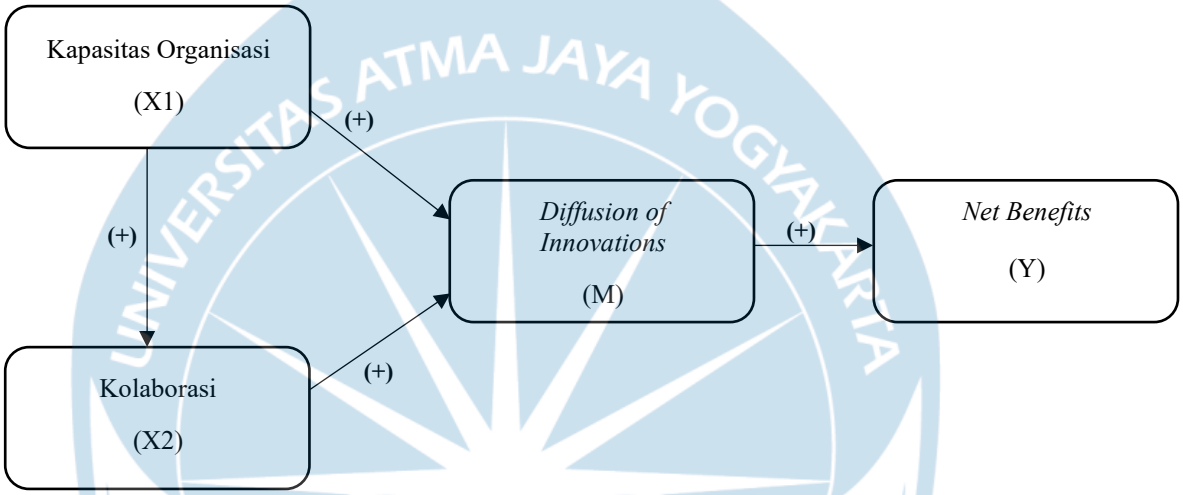
Penelitian (Maulana, 2023) menemukan bahwa efektivitas kolaborasi sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan masing-masing pihak yang terlibat (Aligarh et al., 2023) mengonfirmasi melalui survei empiris nasional bahwa kapasitas kelembagaan dan kesiapan SDM secara signifikan memengaruhi kemampuan pemerintah desa dalam berkolaborasi. Dalam konteks Kabupaten Wonogiri, minimnya koordinasi antara DPMD, kecamatan, dan operator desa (Inspektorat Daerah Kabupaten Wonogiri, 2023) dapat dipahami sebagai cerminan dari keterbatasan kapasitas organisasi yang menghambat terbentuknya ekosistem kolaborasi yang fungsional.

Dalam konteks Kabupaten Wonogiri, minimnya koordinasi antara DPMD, kecamatan, dan operator desa yang tercatat dalam data Inspektorat Daerah (2023) dapat dipahami bukan semata sebagai persoalan kemauan berkolaborasi, melainkan sebagai cerminan dari keterbatasan kapasitas organisasi yang menghambat terbentuknya ekosistem kolaborasi yang fungsional. Ketika aparatur desa memiliki kompetensi yang memadai dan kelembagaan yang terstruktur, mereka akan lebih mampu merespons kebutuhan koordinasi, mengkomunikasikan kendala teknis kepada pendamping desa, serta menginisiasi kerja sama lintas-lembaga yang berkelanjutan. Berdasarkan argumentasi teoritis dan bukti empiris tersebut, hipotesis keempat dirumuskan sebagai berikut:

H4: Kapasitas organisasi berpengaruh positif terhadap kolaborasi dalam implementasi SISKEUDES di Kabupaten Wonogiri

2.8.5. Kerangka Model Penelitian

Menurut (Hartono, 2017), model penelitian adalah bentuk simbol dari suatu teori. Model penelitian yang peneliti gunakan untuk mengilustrasikan hubungan pengaruh antar variabel dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1 Model Penelitian

Kerangka model penelitian dalam penelitian ini telah disusun sesuai dengan hubungan antar variabel yang dirumuskan dalam hipotesis penelitian. Model penelitian menggambarkan pengaruh kapasitas organisasi dan kolaborasi terhadap Diffusion of Innovations sebagai variabel mediasi, serta pengaruh Diffusion of Innovations terhadap net benefits SISKEUDES. Selain itu, terdapat hubungan langsung antara kapasitas organisasi dan kolaborasi dalam implementasi SISKEUDES. Kerangka model tersebut dibangun berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang relevan, sehingga mendukung pengujian hipotesis yang diajukan oleh penulis secara sistematis dan empiris.